

ISLAM DAN KEKUASAAN ORDE BARU: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto

Darmawijaya

Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Khairun Ternate

Alamat Email: Wijaya84@yahoo.com

Abstract

In 1966 was the beginning of New Order rezim. There was anyone who cannot argue that Moslem people had played an important role in bearing a new order. It was, therefore, natural that Moslem people have very extremely expected to manage this state with many more. This expectation was just imagination, because Suharto, as a leader of new order, did not give space adequately for them. Suharto exactly runs political of deislmatization systematically, in essential for marginalizing for Moslem people. The process reached the climax in 1985, in where the new order issued regulation setting that Pancasila (the five basic principles of Republic of Indonesia) as a single principle, so this signed the death of Islam as political ideology in Indonesian history.

Keyword: Moeslem, New Order rezim, a single principle.

Intisari

Pada tahun 1966 adalah awal dari rezim Orde Baru. Tak seorangpun membantah bahwa umat muslim telah memainkan peran penting dalam membawa tatanan baru. Oleh karena itu, hal yang biasa bagi muslim sangat diharapkan untuk mengelola negara ini dengan cara mayoritas. Harapan tersebut menjadi hanya imajinasi, karena Suharto, sebagai pemimpin orde baru, tidak memberikan ruang cukup bagi mereka. Suharto dalam menjalankan sitem deislmisasi dalam percaturan politik, hal tersebut berfungsi dalam untuk menyingkirkan secara perlahan muslim-muslim yang punya posisi secara politik. Proses ini mencapai puncaknya di tahun 1985, dibuktikan dengan mengeluarkan peraturan dengan menetapkan bahwa Pancasila (lima prinsip dasar Republik Indonesia) sebagai asas tunggal .

olehnya paper ini membahas tentang konsep orde baru dalam konsep kematian ajaran Islam sebagai ideologi politik dalam sejarah Indonesia.

Kata Kunci: Umat Islam, Orde Baru, Azas Tunggal.

Pendahuluan

Setelah terjadinya Gerakan 30 September 1965, pada sore harinya, tanggal 1 Oktober 1965, tokoh-tokoh muda Islam Indonesia dari berbagai organisasi, seperti Gerakan Pemuda Anshar, HMI, PII dan Pemuda Muhammadiyah, mengadakan pertemuan di rumah Subchan Z.E. (tokoh NU) di jalan Bayuwangi Jakarta. Pertemuan ini membahas tentang bagaimana langkah-langkah yang akan diambil untuk mendukung TNI Angkatan Darat dalam menumpas PKI. Pertemuan ini sepakat membuat sebuah wadah yang bernama Komando Aksi Pengganyangan(KAP) Gestapu. Pada tanggal 3 Oktober 1965, PII dengan dukungan dari ribuan anggotanya mengadakan “Apel Akbar” di halaman gedung Front Nasional. Apel Akbar itu mendesak agar rakyat Indonesia untuk segera mengganyang tokoh-tokoh PKI seperti Aidit dan Subandrio.¹

Pada tanggal 4 Oktober 1965, KAP Gestapu melakukan “Rapat Umum” di Taman Sunda Kelapa Jakarta. Rapat Umum ini dihadiri oleh ribuan massa umat Islam yang berasal dari Gerakan Pemuda Anshar, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muslimin, HMI, dan PII. Di samping itu, hadir pula massa dari Pemuda Pancasila, Gasbiindo, dan PMKRI. Dalam rapat umum telah dikeluarkan suatu resolusi yang berisi tuntutan pembubaran PKI dengan segala antek-anteknya.²

Pada tanggal 8 Oktober 1965, gerakan anti PKI yang didominasi oleh kekuatan Islam yang didukung oleh TNI Angkatan Darat menguasai jalan-jalan yang ada di Jakarta. Pada tanggal ini pula, massa anti PKI berhasil membakar Markas Besar PKI yang ada di Jakarta.³ Pada tanggal 9-11 Oktober 1965, organisasi Muhammadiyah mengadakan pertemuan di Jakarta. Pertemuan ini sepakat untuk membantu TNI-Angkatan Darat dalam merobohkan kekuatan PKI selaku motor penggerak peristiwa Geraka 30 September 1965. Putusan Muhammadiyah ini juga didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Umat Islam Indonesia sudah

1 Abdul Qadir Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*, (Surabaya: Tri Bakti, 1996), hlm. 229.

2 *Ibid.*

3 M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 594.

begitu antipatinya terhadap PKI, karena PKI selalu mengganyang umat Islam.⁴ Bahkan, sikap antipati tersebut berubah menjadi ledakan emosional yang cukup besar, yang ditandai dengan terlibatnya umat Islam Indonesia dalam aksi pembunuhan terhadap kader-kader PKI di berbagai wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, pembunuhan terhadap kaum komunis dilakukan oleh massa NU. Jawa dan Bali merupakan daerah yang paling parah dalam tragedi ini.⁵

Aksi pembersihan terhadap kaum komunis Indonesia mulai berakhir pada bulan-bulan pertama 1966. Berapa korban yang meninggal dalam peristiwa ini belum ada data yang menyebutkan secara pasti. Sebagian besar ahli memperkirakan setidaknya sekitar lima ratus ribu orang, tetapi tak ada seorang pun yang benar-benar tahu, karena tak seorang pun menghitungnya.⁶

Walaupun PKI sudah lemah diberbagai wilayah Indonesia, akan tetapi Presiden Sukarno belum mampu menyelesaikan masalah Gerakan 30 September 1965 secara politik. Keadaan ini diperparah lagi dengan situasi ekonomi yang semakin carut marut. Rakyat Indonesia meminta kepada Presiden Sukarno untuk membubarkan PKI dan memperbaiki perekonomian. Sikap Presiden Sukarno yang seakan-akan melindungi PKI telah menyulut kemarahan dari rakyat Indonesia. Atas dasar itu, KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang telah berdiri sejak tanggal 25 Oktober 1965 semakin gencar melakukan aksi.⁷ Presiden Sukarno bukannya mengadili tokoh-tokoh intelektual yang terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan memperbaiki keadaan ekonomi, akan tetapi Presiden Sukarno membangun kekuatan tandingan yang bernama "Barisan Sukarno". Pada tanggal 16 Januari 1966 Perdana Menteri I Subandrio mengumumkan berdirinya Barisan Sukarno, yang kekuatannya terdiri dari para buruh, petani, pemuda dan wanita baik di kota-kota maupun di desa-desa untuk melawan "terror kontra terror". Barisan Sukarno diumumkan melalui RRI,

4 Pengganyangan kaum komunis terhadap Islam di Indonesia dimulai dari pengganyangan terhadap organisasi Sarekat Islam pada tahun 1920-an. Akibat pengganyangan itu, Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih adalah sarekat Islam yang berpegang teguh pada ideology Islam dan Sarekat Islam Merah adalah Sarekat Islam yang telah berhasil dipengaruhi oleh kaum komunis.

5 M.C, Ricklefs., *Op. Cit.*, hlm. 595.

6 *Ibid.*

7 *Ibid.* KAMI berdiri atas prakarsa Marie Muhammad, Sekretaris Jendral PB HMI yang dideklarasikan di rumah Menteri Syarif Thayeb. Kekuatan KAMI didominasi oleh mahasiswa Islam dan ditambah mahasiswa-mahasiswa dari kalangan Kristen, Khatolik dan mantan PSI. Abdul Qadir Djaelani, *Op. Cit.*, hlm. 236.

sehingga bias didengar di seluruh tanah air.⁸

Diumumkannya Barisan Sukarno oleh Subandrio bukan membuat KAMI menjadi gentar, KAMI aktif terus melakukan aksi. KAMI konsisten meminta kepada Presiden Sukarno untuk membubarkan PKI dan memperbaiki perekonomian yang semakin terpuruk. Dalam aksinya, tanggal 24 Januari 1966, KAMI kehilangan satu anggotanya, yaitu Arief Rahman Hakim, mahasiswa UI. Gugurnya Arief Rahman Hakim membuat gerakan KAMI semakin militan. Tanggal 26 Januari 1966, Presiden Sukarno membubarkan KAMI, menutup Kampus UI, dan menggelar kekuatan militer di jalan-jalan Jakarta, dengan kendaraan lapis baja beserta rintangan kawat-kawat berduri. KAMI tidak tinggal diam atas tindakan Presiden Sukarno tersebut. Pada tanggal 4 Maret 1966, eksponen KAMI membentuk Laskar Arief Rahman Hakim dengan kekuatan 7 batalyon dari 42 Universitas. Tindakan eksponen KAMI ini diikuti pula oleh PII (Pelajar Islam Indonesia). Pada tanggal 5 Maret 1966, PII berhasil memelopori berdirinya KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) di Markas Besar PII Jakarta. Di dalam KAPPI bergabung organisasi-organisasi pelajar, seperti PII, Ikatan Pelajar Al Washliyah, Ikatan Pelajar Ekonomi dan Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966, Laskar Arif Rahman Hakim dan KAPPI berhasil menduduki Departemen Luar Negeri. Aksi-aksi pendudukan semacam ini berjalan terus hingga beberapa hari.⁹

Soeharto yakin bahwa ia mendapat dukungan yang luas dari rakyat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia, maka Soeharto berani mengambil sikap yang lebih maju. Soeharto berhasil menekan Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau lebih dikenal dengan istilah Supersemar.¹⁰ Dengan memegang Supersemar, Suharto secara bertahap melakukan langkah-langkah pengambilalihan kekuasaan dari Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Maret 1966,

8 Abdul Qadir Djaelani., *Op. Cit.*, hlm. 239.

9 *Ibid.*, hlm. 241.

10 Suharto sebagai pimpinan Angkatan Darat mengutus tiga orang bawahannya untuk menemui dan meminta Presiden Sukarno menandatangani Supersemar. Tiga orang tersebut adalah Amir Mahmud, Basuki Rahmat dan M. Yusuf. Lihat Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 76. Bagi Suharto, Supersemar memiliki makna yang sangat strategis, karena Supersemar merupakan "tangga emas" Suharto untuk naik menjadi pemimpin Indonesia yang baru setelah Sukarno, bahkan sebagian pengamat menilai bahwa Supersemar itu merupakan kudeta merangkap yang dilakukan oleh Suharto terhadap Presiden Sukarno. Lihat Eros Djarot dkk, *Misteri Supersemar*, (Jakarta: Mediakita, 2006) dan A. Pambudi, *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jendral*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006). Lihat juga Asvi Warman Adam, *Suharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2004). Lihat juga Firdaus Syam, *Amien Rais Politisi Yang Merakyat dan Intelektual Yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003), hlm. 144.

Suharto atas nama pemegang amanat Supersemar membubarkan PKI dan menangkap sejumlah menteri yang diduga terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.¹¹ Pada tanggal 20 Juni- 5 Juli 1966, MPRS melakukan sidang dan siding MPRS ini berhasil mengambil beberapa keputusan penting, diantaranya adalah menetapkan Supersemar sebagai Keputusan MPRS, membubarkan PKI dan mengharamkan marxisme sebagai doktrin politik di Indonesia, mencabut kembali pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup dan menunjuk Suharto sebagai kepala pemerintahan sementara.¹² Pada bulan Maret 1967, MPRS melakukan Sidang Istimewa dan mengambil beberapa keputusan penting, diantaranya adalah mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden yang depenitif oleh MPR hasil pemilihan umum. Pada bulan Maret 1968, MPRS bersidang kembali dan menetapkan Soeharto sebagai presiden yang depenitif untuk masa jabatan lima tahun.¹³ Dengan ditetapkannya Suharto sebagai Presiden Indonesia, maka dimulailah babak baru sejarah Indonesia dibawah kendali rezim yang bernama Orde Baru, dimana Soeharto sebagai pemain utamanya.

Pada awal Orde Baru, sebenarnya sempat muncul romantisme politik Islam, yang telah mati suri di era Demokrasi Terpimpin. Harapan baru ini terutama dilandaskan pada fakta tentang jasa-jasa umat Islam ketika bersama-sama dengan TNI-Angkatan Darat dalam menumbangkan Orde Lama dan kekuatan PKI.¹⁴ Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kemenangan Orde Baru dianggap sebagai kemenangan Islam. Atas dasar itu, kalangan Islam mulai membahas kembali masalah Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1968 dilakukan peringatan Hari Piagam Jakarta, di gedung Pola Jakarta.¹⁵ Dalam acara peringatan ini hadir pula Jendral A.H. Nasution. Pada acara peringatan

¹¹ Menteri-menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September 1965, diantaranya adalah Subandrio, Chaerul Saleh, Yusuf Muda Dalam dan Panglima AU, Umar Dani). Musyrifah Susanto., *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹² Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), hlm. 366.

¹³ *Ibid.*, hlm. 367. M.C. Ricklefs., *Op. Cit.*, hlm. 595. Lihat juga Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 416. Kebijakan MPRS mengangkat Suharto sebagai Presiden Indonesia yang baru mendapat kritikan yang tajam dari sejumlah kalangan, terutama mahasiswa. Mereka meminta agar Presiden Indonesia yang baru dipilih melalui Pemilihan Umum, bukan melalui pengangkatan.

¹⁴ Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008), hlm. 81.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 82. Acara peringatan ini dilakukan kembali pada tanggal yang sama tahun 1969. Ahmad Ibrahim dkk, ed., *Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 74.

itu, Menteri Agama K.H.M. Dahlan, yang juga salah satu tokoh NU, dalam pidatonya, ia berkata:

"...Di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, melainkan ia telah menjadi kenyataan di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari, telah menjadi adat yang mendarah daging...Di samping Piagam Jakarta itu menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, maka ia pun juga merupakan sumber hukum. Ini adalah otomatis."¹⁶

Pada sidang istimewa MPRS tahun 1968, kalangan Islam sepakat mengusulkan kembali agar Piagam Jakarta diterapkan, tetapi akhirnya gagal, karena usulan mereka ditolak oleh kalangan Kristen, Partai Sosialis Indonesia dan ABRI.¹⁷ Partai Masyumi yang pernah dilarang pada era Presiden Sukarno akan dibangun kembali oleh kalangan modernis Islam. Harapan untuk bangun kembali bagi Partai Masyumi tidaklah mengada-ada, karena rezim Orde Baru telah membebaskan tokoh-tokoh Masyumi yang telah dipenjarakan oleh Sukarno, seperti Muhammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito dan Buya Hamka.¹⁸

Sayangnya, suasana romantisme yang terbangun antara umat Islam dan pemerintah Orde Baru tidak berjalan lama, karena Soeharto sebagai pemimpin baru Indonesia memiliki pandangan tersendiri terhadap Islam dan telah menyiapkan berbagai kebijakan politik yang tidak berpihak pada umat Islam Indonesia. Diberlakukannya asas tunggal Pancasila pada tahun 1985 adalah merupakan puncak de-Islamisasi rezim Orde Baru terhadap Islam sebagai ideology.

Pengebirian Peran Politik Umat Islam Indonesia Tahun 1966-1985

Tidak ada seorangpun yang dapat menafikan bahwa umat Islam telah memainkan peranan yang sangat besar dalam menghancurkan kekuatan Komunis di Indonesia dan sebagai salah satu komponen utama bagi lahirnya Orde Baru. Namun demikian, setelah berkuasa, rezim Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto tidak memberikan

16 Jan S. Aritonang., *Op. Cit.*, hlm. 372. Acara peringatan hari lahirnya "Piagam Jakarta" ini mendapat kritik dari tiga organisasi pemuda Khatolik, yaitu Pemuda Khatolik, GPPSK dan PMKRI.

17 *Ibid.*, Dhurorudin Mashad., *Op. Cit.*, hlm. 82. Ahmad Ibrahim dkk, ed., hlm. 73. Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 127.

18 Mundzirin Yusuf dkk., *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), hlm. 269.

tempat yang layak bagi Islam, akan tetapi membuat langkah-langkah secara sistematis untuk menghancurkan kekuatan Islam. Soeharto sebagai "The Big Bos" Orde Baru berusaha melakukan marjinalisasi Islam secara politik dan membuat berbagai kebijakan yang melukai hati umat Islam.

Setelah Soeharto diangkat secara resmi oleh MPRS menjadi presiden Indonesia pada tahun 1968, maka Soeharto mulai secara bertahap melakukan proses marjinalisasi terhadap kekuatan politik Islam. Hal ini berlangsung hingga akhir tahun 1980-an. Mengapa Soeharto tidak memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membangun kekuatannya? Hal ini bias dijawab secara antropologis dan politik. Secara antropologis, sebagaimana yang dikaji oleh Clifort Gert, Soeharto termasuk dari kelompok Islam abangan. Soeharto adalah orang yang sangat mempercayai klenik kebatinan Jawa. Sebagai seorang abangan sudah tentu Soeharto tidak memiliki referensi yang memadai tentang Islam. Ketidaktahuan Soeharto akan ajaran Islam dan kedekatan Soeharto dengan tokoh-tokoh anti-Islam, maka membuat Soeharto menjadi curiga dan takut bahwa kekuatan Islam akan muncul kembali. Secara politik, Soeharto ingin menjadi penguasa tunggal yang bertahan lama. Jika Soeharto memberikan kebebasan kepada tokoh-tokoh Islam, terutama mantan tokoh-tokoh Masyumi untuk melakukan konsolidasi, maka posisinya sebagai orang kuat tidak akan bertahan lama. Kebijakan-kebijakan bersifat otoriter yang bertujuan untuk menjaga hegemoninya adalah merupakan langkah tepat, walaupun itu semua menuai berbagai resiko.

Sejak digalangnya usaha penumpasan terhadap gerakan 30 September yang dimotori PKI hingga awal berdirinya rezim Orde Baru, hubungan antara umat Islam dengan TNI Angkatan Darat terjalin dengan suasana yang cukup romantis. Mereka saling mendukung mendukung untuk menghancurkan kaum komunis di Indonesia. Romantisme itu ditandai dengan dibebaskannya tokoh-tokoh Masyumi yang dipenjarakan oleh Soekarno.

Setelah bebas dari penjara, tokoh-tokoh Masyumi berharap dapat kembali menghidupkan partainya yang telah dibubarkan pada era Soekarno. Misalnya, Prawoto Mangkusasmito sebagai mantan Ketua Masyumi sangat aktif untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi. Namun usaha tersebut mendapat tantangan yang sangat keras dari berbagai pihak, terutama dari TNI-Angkatan Darat, kalangan Kristen/Khatolik dan para tokoh Partai Nasional Indonesia. Alasan yang banyak digunakan adalah bahwa Masyumi merupakan partai politik

yang telah dibubarkan karena telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 dan banyak tokoh-tokohnya yang terlibat dalam peristiwa PRRI. Sekalipun secara formal alasan penolakan terhadap rehabilitasi Partai Masyumi adalah karena persoalan hukum, namun sebenarnya lebih bersifat psikologis, yaitu akibat dari kekhawatiran akan kembalinya kebesaran Partai Masyumi. Jika kekuatan politik Islam diberi kesempatan untuk melakukan konsolidasi, setelah digyang oleh Soekarno dan PKI, maka Islam dengan mudah memobilisasi dirinya untuk menjadi satu kekuatan politik yang sangat besar dan terbuka peluang untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Akibat dari ketakutan akan bahaya kekuatan Islam, maka penguasa Orde Baru melarang tokoh-tokoh Islam untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi.¹⁹

Pada tanggal 7 Januari 1967, Presiden Suharto memberikan tanggapan resmi atas adanya keinginan dari kalangan Islam modernis untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi. Presiden Suharto mengatakan:

*"Pada kesempatan ini saya juga ingin secara berterus terang tentang menjelaskan kepada saudara, bahwa baik ABRI sebagai keseluruhan angkatan maupun keluarga prajurit-prajurit sungguh-sungguh telah memberikan banyak pengorbanan lahir dan batin untuk menumpas pemberontakan itu...Saya berharap saudara dapat memahami pendirian pemerintah pada umumnya dan ABRI pada khususnya, terhadap bekas partai politik Masyumi. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan dan psikologis telah membawa ABRI pada suatu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi."*²⁰

Sikap tegas Presiden Suharto ini dinilai oleh kalangan Islam modernis sebagai sikap yang sangat tidak aspiratif. Dalam sejarah Indonesia, bukan tentara yang saja yang telah berkorban lahir batin untuk mempertahankan negara Indonesia, akan tetapi Partai Masyumi dan para pengikutnya juga telah berjuang mati-matian demi selamatnya Indonesia. Pada tahun 1950, Muh. Natsir telah mengeluarkan "mosi integral" demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di era Demokrasi Parlementer, tokoh-tokoh Masyumi adalah tokoh-tokoh yang taat pada asas demokrasi, bahkan demi membela demokrasi itu sendiri, tokoh-tokoh Masyumi rela membubarkan partainya dan membiarkan diri mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim

19 Asep Gunawan, Ed., *Artikulasi Islam Kultural Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: Srigunting, 2004), hlm. 267-268. Ahmad Ibrahim dkk, ed., *Op. Cit.*, hlm. 71. Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 4.

20 Jan.S. Aritonang, hlm. 369.

Sukarno. Para pengikut Masyumi juga memiliki andil yang sangat besar atas menangnya kekuatan tentara terhadap rezim Sukarno. Jadi tidak ada satu alasan pun yang cukup orisinil untuk melarang Partai Masyumi melakukan rehabilitasi. Hanya satu alasan yang dapat menjelaskan mengapa Presiden Suharto melarang rehabilitasi Masyumi, yaitu adanya keinginan Presiden Suharto untuk menjadi penguasa tunggal di Indonesia dan hal itu akan terlihat setelah masa-masa berikutnya.

Setelah Masyumi dilarang untuk direhabilitasi oleh Suharto, sebenarnya ada tawaran menarik dari intelektual muda Islam yang bernama Nurcholis Majid.²¹ Menurut Nurcholis Majid, umat Islam harus membuat format baru atas strategi perjuangan, karena semakin kuatnya tekanan yang datang dari rezim yang berkuasa. Nurcholis Majid menyarankan agar umat Islam perlu melakukan sekulerisasi sebagai bentuk penyesuaian atas sikap pemerintah yang semakin otoriter. Semboyan "Islam Yes, Partai Islam No" adalah semboyan yang diusung oleh Nurcholis Majid. Ide sekulerisasi yang diusung oleh Nurcholis Majid ini mendapat tantangan yang hebat dari kalangan intelektual Islam, seperti Prof.Dr.H. Rasyidi, Prof.Dr. Deliar Noer, Abdul Qadir Djaelani dan Dr. Daud Rasyid. Prof. Dr.H. Rasyidi, secara khusus menulis sebuah buku yang berjudul : "*Koreksi Terhadap Drs. Nurcholis Majid Tentang Sekulerisasi*". Dalam buku tersebut, Prof. Dr. H. Rasyidi secara tegas menolak terhadap isu sekulerisasi Islam yang diusung oleh Nurcholis Majid. Prof. Dr.H. Rasyidi secara tegas mengatakan bahwa antara Islam dan politik adalah dua hal yang tidak bias dipisah-pisahkan dan ini telah diperjuangkan sejak jaman kolonial hingga lahirnya rezim Orde Baru.²² Abdul Qadir Djaelani mengatakan, bahwa ide sekulerisasi yang diusung oleh Nurcholis Majid adalah gerakan de-Islamisasi dan anti Islam, sedangkan Dr. Daud Rasyid berpendapat, bahwa ide sekulerisasi tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan bertolak belakang dengan prinsip kenegaraan yang diformulasi oleh ulama Islam zaman dulu, bahkan ada sebagian umat

21 Nurcholis Majid adalah mantan Ketua Umum PB HMI tahun 1967 dan 1969.

22 Isu sekulerisasi itu dilontarkan oleh Nurcholis Majid pada tanggal 2 Januari 1970 ketika ia memberikan sebuah ceramah halal bi halal yang berjudul "*Keharusan Meperbaharui Pemahaman Islam dan Masalah Integrasi Islam*". Pada tanggal 30 Oktober 1972 diadakan sebuah pertemuan bergensi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan tema: "*Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia*". Dalam pertemuan ini, Nurcholis Majid kembali menegaskan bahwa perlu sekulerisasi Islam dan meninggalkan langkah-langkah politik yang sifatnya konservatif dan formalistic. Lihat, Ahmad Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 549. Lihat juga Firdaus Syam., *Op. Cit.*, hlm. 148, 169.

Islam Indonesia yang menuduh bahwa Nurcholis Majid adalah lobi Yahudi di Indonesia.²³

Setelah Partai Masyumi dilarang untuk dihidupkan kembali, sekarang Bung Hatta, seorang tokoh yang tidak diragukan lagi jiwa nasionalismenya, mencoba mendirikan partai baru yang bernama Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Pada tanggal 11 Januari 1967, Mohammad Hatta mengirimkan surat kepada Suharto tentang niatnya mendirikan PDII. Pada tanggal 17 Mei 1967, Presiden Suharto memberikan jawaban yang tidak baik, yaitu Presiden Suharto secara tegas tidak memberikan izin bagi Mohammad Hatta untuk mendirikan partai yang dia maksud.²⁴ Kebijakan Presiden Suharto yang tidak memberikan izin bagi Mohammad Hatta untuk mendirikan PDII tidak memiliki alasan yang kuat. Apa salahnya Mohammad Hatta, dia adalah orang nasionalis yang tidak perlu diragukan lagi jiwa nasionalismenya. Mohammad Hattalah orangnya yang berhasil melobi kalangan Islam, sehingga kalangan Islam rela melakukan perubahan terhadap Piagam Jakarta. Mohammad Hatta juga tidak pernah tercemar namanya, karena terlibat dalam satu pemberontakan. Ketidaksiapan Presiden Suharto untuk bersaing secara jantan dalam suksesi nasional adalah merupakan satu-satunya alasan yang bisa dipakai mengapa Suharto melarang tokoh-tokoh Masyumi maupun Mohammad Hatta untuk mendirikan partai politik. Ketakutan Suharto semakin terlihat dengan diulur-ulurnya waktu pelaksanaan Pemilu. Pemilu pertama dalam era Suharto baru terlaksana pada tahun 1971, padahal MPRS telah menetapkan bahwa Pemilu akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.²⁵

Untuk menampung aspirasi Islam, terutama kalangan modernis, Pemerintah Orde Baru hanya mengisinkan berdirinya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), akan tetapi pemerintah Orde Baru tidak menyetujui, jika mantan tokoh-tokoh Masyumi duduk sebagai pengurusnya. Pada kongres I Parmusi pada bulan November 1968 di Malang terpilihlah Muhammad Roem sebagai ketuanya, akan tetapi karena Muhammad Roem adalah mantan tokoh Masyumi yang masih berpengaruh, maka pemerintah Orde Baru tidak merestuinnya. Pemerintah Orde Baru melalui menteri sekretaris negara, Jendral

²³ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁴ Firdaus Syam., *Op. Cit.*, hlm. 146. Jan.S. Aritonang., *Op. Cit.*, hlm. 368. Jika Suharto membolehkan Bung Hatta memimpin PDII, maka Bung Hatta dengan popularitasnya sebagai Bapak Proklamator yang bersih dan berwibawa akan menjadi ancaman besar bagi Suharto yang ingin menancapkan hegemoninya. Lihat Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hlm. 4. Lihat juga M. Abdul Karim dkk, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 25.

²⁵ Jan S. Aritonang., *Op. Cit.*, hlm. 372.

Alamsyah Ratuprawiranegara, mengirimkan telegram ke Malang untuk menginformasikan, bahwa pemerintah tidak dapat menerima Mr. Muhammad Roem. Sebagai jalan keluar yang terbaik pada waktu itu, maka kongres sepakat memilih Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua dan Sekretaris Jendral partai Parmusi. Keduanya berasal dari Muhammadiyah, yang merupakan pendukung terbesar partai Parmusi.²⁶

Namun dalam waktu yang tidak begitu lama, kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun dalam Parmusi tidak dapat dapat bertahan lama. Pemerintah Orde Baru beranggapan, bahwa kepemimpinan mereka ini bisa membahayakan pemerintah. Pemerintah Orde Baru merasa, mereka masih kental ideologi Islamnya. Atas dasar itu, maka pemerintah Orde Baru segera turun tangan untuk melakukan rekayasa politik untuk melakukan penggantian kepemimpinan di tubuh Parmusi. Pemerintah Orde Baru membentuk Opsus yang dipimpin oleh Ali Murtopo. Ali Murtopo dengan opsusnya berhasil menggerogoti kepemimpinan Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun di Parmusi. Atas bantuan Opsusnya Ali Murtopo, Jaelani Naro dan Imran Kadir berhasil naik menjadi pemimpin Parmusi yang baru. Naiknya Jaelani Naro dan Imran Kadir telah membawa konflik internal di tubuh Parmusi. Konflik internal di tubuh Parmusi, yang bermula dari campur tangan pemerintah Orde Baru yang terlalu besar tidak kunjung selesai. Puncak dari konflik ini dimenangkan oleh pemerintah. Pada tanggal 20 November 1970, pemerintah mengeluarkan SK No. 77 Tahun 1970 untuk menunjuk MHS. Mintareja sebagai Ketua Partai Parmusi yang baru.²⁷ MHS. Mintareja adalah tokoh Muhammadiyah yang dipandang cukup akomodatif oleh pemerintah.²⁸

Penunjukkan MHS. Mintareja sebagai pemimpin Parmusi oleh pemerintah tidaklah berlebihan, karena secara pemikiran MHS. Mintareja sangat sesuai dengan pikiran pemerintah. Berikut ini sedikit gambaran tentang pikiran yang dimiliki oleh MHS. Mintareja.

26 Asep Gunawan, ed., *Op. Cit.*, hlm. 269. Djarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun ditetapkan sebagai pemimpin partai Parmusi berdasarkan SK Presiden No.70 Tahun 1968. Lihat juga Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 60. Lihat juga Mundzirin Yusuf dkk., *Op. Cit.*, hlm. 270. Ahmad Ibrahim dkk, ed., *Op. Cit.*, hlm. 72. Musyrifah Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 78.

27 Asep Gunawan, ed., *Op. Cit.*, hlm. 269. Lihat juga Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 61.

28 Ahmad Ibrahim dkk., *Op. Cit.*, hlm. 75. Firdaus Syam, *Op. Cit.*, hlm. 149.

*“Pendekatan yang menekankan perjuangan ideologis sudah ketinggalan zaman. Politik adalah masalah duniawi dan dapat dibedakan dari agama. Keuntungan material harus diusahakan. Mana bukti perjuangan umat Islam selama dua puluh lima tahun kita merdeka. Tampaknya rakyat sudah bosan menunggu hasil-hasil perjuangan yang telah dijanjikan oleh para pemimpin yang hanya mementingkan perjuangan ideology formal. (Pendekatan politik formal) ini kosong; apa yang ditunggu oleh rakyat dan umat Islam terutama adalah hasil-hasil (material) dari perjuangan politik itu. Untuk mencapai hasil ini...kita harus melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, terutama dalam bidang ekonomi... Partai Muslimin Indonesia tidak berhasrat melakukan pendekatan politik formal sebagaimana sebelumnya. Partai Muslimin Indonesia sudah memutuskan...untuk bekerjasama dengan angkatan bersenjata sejalan dengan kelompok pembangunan (orde yang berwawasan kepada pembangunan). Dengan kata lain, Partai Muslimin Indonesia akan melakukan pendekatan politik kebendaan tanpa melupakan dasarnya, yaitu Islam”.*²⁹

Walaupun MHS. Mintareja telah duduk sebagai Pemimpin Parmusi, bukan berarti masalah telah selesai. Konflik antara pemerintah Orde Baru dengan partai Parmusi berlanjut terus hingga Pemilihan Umum tahun 1971. Hal ini disebabkan karena rezim Orde Baru melalui Menteri Dalam Negerinya mengeluarkan kebijakan yang amat merugikan partai-partai Islam. Diantaranya adalah memangkas sebagian besar caleg-caleg yang diajukan oleh partai Parmusi. Jika partai Parmusi diberi kebebasan menyusun daftar calegnya tanpa adanya campurtangan dari rezim Orde Baru, maka partai Parmusi bias melemahkan dan membahayakan partai Golkar sebagai partai resmi pemerintah.³⁰

Nampaknya pemerintah Orde Baru belum juga percaya diri, bahwa mereka mampu mengontrol partai-partai Islam. Untuk mempermudah langkah pemerintah dalam mengawasi partai-partai Islam, maka pada tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu meminta partai-partai untuk melakukan fusi. Pada tanggal

²⁹ Ahmad Ibrahim dkk., *Op. Cit.*, hlm. 79. Pandangan MHS. Mintareja ini sejalan dengan ide sekularisasi Islam yang dilontarkan oleh Nurcholis Majid.

³⁰ Asep Gunawan, Ed., *Op. Cit.*, 270. Lihat Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), hlm. 95. Akibat dari besarnya campur tangan pemerintah, sehingga Parmusi sebagai wadah Islam modernis telah krehilangan wibawanya. Muhammad Natsir, mantan tokoh Masyumi yang berpengaruh tidak memberikan restunya, bahkan Muhammadiyah juga tidak memberikan dukungannya. Hal ini menyebabkan suara Parmusi anjlok pada tahun 1971. Dalam Pemilu 1971, Parmusi hanya mendapat 5,4% suara, sedangkan pada tahun 1955, Masyumi sebagai induk dari Parmusi memperoleh 20% suara.

5 Januari 1973, Partai-partai Islam seperti Parmusi, NU, PSII dan Perti berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).³¹ Proses deklarasi PPP sebagai Partai Islam ditandatangani oleh Idhan Chalid dari NU, M.S. Mintareja dari Parmusi, Anwar Tjokroaminoto dari PSII dan Rusli Halil dari Perti pada tanggal 5 Januari 1973.³² Setelah adanya kebijakan ini, maka di Indonesia hanya ada tiga partai, yaitu Golkar sebagai partai pemerintah, PPP sebagai partai Islam dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) sebagai gabungan dari partai-partai nasionalis dan Kristen.³³

Setelah rezim Orde Baru berhasil memaksa partai-partai Islam melakukan pusi, akan tetapi pemerintah juga belum merasa tenang, karena PPP masih berasaskan Islam. Hal ini bias membawa keuntungan bagi kepentingan politik umat Islam Indonesia dan dapat melemahkan eksistensi Golkar sebagai partai pemerintah. Atas pertimbangan itu, maka rezim Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan baru lagi. Pada tahun 1980, Presiden Soeharto mulai meminta agar rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Permintaan Presiden Soeharto ini tentu bersentuhan langsung dengan hal yang paling mendasar bagi umat Islam Indonesia, yaitu Islam sebagai ideology. Bagi umat Islam Indonesia, kebijakan ini sangat fundamental dan bahkan sangat baru dalam sejarah Nusantara. Di jaman colonial saja, umat Islam tidak dilarang untuk menjadikan Islam sebagai asas organisasinya, baik organisasinya itu bersifat politik, maupun social. Kekhawatiran Presiden Soeharto akan bahaya Islam tidak hanya menimpa PPP sebagai satu-satunya partai yang berbasis Islam, akan tetapi juga menimpa organisasi-organisasi Islam lainnya yang bergerak dalam bidang social kemasyarakatan. Pada tahun 1984, PPP terpaksa menerima asas tunggal Pancasila, karena berdasarkan TAP MPR tahun 1983, semua partai politik harus berasaskan Pancasila. Jika PPP tidak mau menerima asas tunggal Pancasila, maka PPP tidak bias lagi hidup sebagai partai politik di Indonesia. Langkah menerima asas tunggal Pancasila oleh PPP adalah merupakan langkah penyelamatan diri dari rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah PPP menerima asas tunggal Pancasila, maka yang semula lambing partainya ka'bah, maka diganti

31 Semula pemerintah berencana membentuk Partai Spritual yang menghimpun semua agama, baik Islam maupun Kristen, akan tetapi ditolak oleh partai-partai Kristen, bahkan Partai Khatolik dengan tegas mengatakan, bahwa lebih baik bubar ketimbang bergabung dengan partai-parti Islam dalam Kelompok Spritual. Jan S. Aritonang, *Op. Cit.*, hlm. 377.

32 *Ibid.*, hlm. 378.

33 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 62. Mundzirin Yusuf dkk, *Op. Cit.*, hlm. 274. Ahmad Ibrahim dkk, *Op. Cit.*, hlm. 80. Firdaus Syam, *Op. Cit.*, hlm. 150.

dengan bintang, yang diambil dari lambing sila pertama Pancasila.³⁴

Berubahnya asas PPP dari asas Islam ke asas Pancasila, bagi sebagian kalangan Islam memandang, bahwa PPP telah melakukan "politik hara kiri", bahkan ada yang mengatakan, bahwa PPP telah "bertukar kelamin".³⁵ Bagaimanapun sinisnya pandangan yang dating dari sebagian kalangan Islam, akan tetapi menerima asas tunggal Pancasila adalah langkah yang paling tepat demi menjaga kelangsungan PPP sebagai partai yang berbasis Islam. Jika PPP tidak mau menerima asas tunggal Pancasila, maka PPP harus membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh pemerintah.

Dengan dipakainya Pancasila sebagai asas partai bagi PPP, maka PPP tidak lagi bisa membedakan diri dengan partai-partai lainnya, yaitu Golkar dan PDI. Secara ideologis, kebijakan asas tunggal Pancasila yang dipaksakan oleh Soeharto adalah merupakan puncak dari de-Islamisasi di era Orde Baru. Sejarawan Indonesia, Taufik Abdullah, mengatakan bahwa dengan diambilnya Pancasila sebagai asas bagi PPP, maka hal ini merupakan halaman akhir dari sejarah Islam politik di Indonesia.³⁶ Sejarah panjang Indonesia, semenjak zaman penjajahan sampai sekarang, di mana partai-partai Islam selalu tampil ke depan namun pada masa rezim Orde Baru, semuanya di larang. Tidak ada lagi yang namanya partai Islam. Semua partai yang ada sama, karena semuanya telah berasaskan Pancasila.³⁷

Reaksi Umat Islam Terhadap Azas Tunggal

Rezim Orde Baru mulai melontarkan isu asas tunggal Pancasila pada tahun 1980. Isu ini sengaja dilontarkan oleh rezim Orde Baru sebagai tindak lanjut dari upaya penguburan ideology Islam di Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 1980, dalam Rapim ABRI di Riau, Presiden Soeharto sebagai penguasa Orde Baru secara resmi melontarkan isu asas tunggal Pancasila. Pada tanggal 16 April 1980, Presiden Suharto kembali membahas asas tunggal Pancasila dalam pidatonya pada Hari Ulang Tahun Kopassus di Jakarta. Dalam pidatonya itu, baik waktu di Riau maupun di Jakarta, Presiden Suharto menginginkan agar Pancasila menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasannya adalah supaya Pancasila tidak lagi disalahgunakan dan dirongrong oleh berbagai kekuatan, baik ekstrim

34 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 72.

35 Firdaus A.N., *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), hlm. 122.

36 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 72. Mundzirin Yusuf dkk., *Op. Cit.*, hlm. 275.

37 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 72

kiri maupun ekstrim kanan³⁸. Dalam sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 1980, Presiden Suharto menegaskan kembali perlunya asas tunggal Pancasila bagi kekuatan social dan politik di Indonesia.³⁹

Adanya keinginan Presiden Suharto untuk menjadikan asas tunggal Pancasila tentu membawa kegusaran yang mendalam di kalangan Islam. Keinginan Presiden Suharto ini dianggap oleh kalangan Islam sebagai upaya menggantikan agama dengan Pancasila. Dalam keadaan yang berat seperti ini, umat Islam Indonesia harus berpikir keras untuk bias mengambil kebijakan yang betul-betul arif dan professional. Umat Islam Indonesia dihadapkan pada posisi harus menerima, jika tidak mau menerima, maka umat Islam Indonesia akan dicap sebagai perongrong pemerintah dan hal ini amat membahayakan eksistensi umat Islam Indonesia.

NU adalah merupakan ormas Islam yang pertama yang menyatakan kesediaannya dalam menerima asas tunggal Pancasila. Pada tanggal 20 Oktober 1983, NU melalui Munas Alim Ulama di Situbondo menyatakan bersedia menerima asas tunggal Pancasila.⁴⁰ Keputusan Munas Alim Ulama ini dikuatkan lagi dalam Mukhtamar NU tahun 1984.⁴¹ Bersediannya NU menerima asas tunggal Pancasila bukan tanpa resiko. Di kalangan Islam, NU dijuluki sebagai organisasi Islam yang akomodasionis, bahkan "oportunistik".⁴² Sikap sinis ini muncul, karena NU terlalu cepat menerima asas tunggal Pancasila, padahal asas tunggal Pancasila baru sekedar isu yang dilontarkan oleh pemerintah, belum berwujud Undang-Undang, akan tetapi mengapa NU terlalu cepat mengibarkan "Bendera Putih" dan tidak berjuang terlebih dahulu.⁴³

Berbeda dengan NU, Muhammadiyah tidak bias mengambil keputusan cepat dalam menerima asas tunggal Pancasila. Muhammadiyah mengulur-ulur waktu untuk melihat perkembangan

38 Orde Baru menyebutkan ideology komunis sebagai ekstrim kiri dan ideology Islam sebagai ekstrim kanan.

39 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 68.

40 Munas Alim Ulama NU ini juga memutuskan, bahwa NU menyatakan keluar dari PPP dan tidak lagi mengurus masalah politik. M.C. Ricklef, *Op. Cit.*, hlm. 645. Kiai Achmad Siddiq, adalah tokoh NU yang berperan besar dalam meyakinkan ulama-ulama NU dalam menerima asas tunggal Pancasila. Menurut Kiai Achmad Siddiq, bahwa Pancasila dan Islam adalah dua kesatuan yang terpisah namun tidak saling bertentangan. Pancasila adalah ideology sedangkan Islam adalah agama. Selain itu, Kiai Achmad Siddiq telah mendapat jaminan dari pemerintah, bahwa Pancasila tidak akan menjadi "agama baru", pemerintah hanya menginginkan sebuah negara yang kuat dan bersatu. Lihat juga Martin van Bruinessen, *Op. Cit.*, hlm. 113.

41 Lili Romli, *Op. Cit.*, hlm. 69.

42 *Ibid.*, hlm. 70.

43 Firdaus A.N., *Op. Cit.*, hlm. 56.

keadaan. Mukhtar Muhammadiyah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1982, terpaksa ditunda hingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Keormasan. Pada tanggal 22 Oktober 1983, Muhammadiyah mengadakan pertemuan antar ketua wilayah sebagai persiapan untuk mengadakan mukhtar Muhammadiyah ke-41 yang akan diadakan di Solo tahun 1984. Mukhtar ini kembali ditunda, karena Muhammadiyah masih menunggu RUU Keormasan yang masih belum selesai digodok oleh pemerintah. Pada tanggal 31 Mei 1985, RUU Asas Tunggal Pancasila disahkan oleh DPR dan pada tanggal 17 Juni 1985 Presiden Suharto resmi mengeluarkan Undang-Undang Keormasan, yaitu UU No. 8 Tahun 1985.⁴⁴ Undang-Undang ini menetapkan Pancasila sebagai satu-satu asas resmi bagi semua ormas yang ada di Indonesia. Keluarnya Undang-Undang Keormasan ini membuat Muhammadiyah harus menentukan sikap. Muhammadiyah akan menentukan sikap melalui mukhtarannya yang sudah lama tertunda-tunda. Pada tanggal 7-11 Desember 1985, Muhammadiyah mengadakan Mukhtar ke-41 di Surakarta. Melalui Mukhtar ke-41 ini, Muhammadiyah menyatakan diri bersedia menerima asas tunggal Pancasila. Bagi Muhammadiyah, tidak pilihan lain selain menerima asas tunggal Pancasila, jika Muhammadiyah masih ingin hidup di bumi Indonesia. Di samping itu, kalangan Muhammadiyah juga sudah ada sedikit kelegaan, karena Presiden Suharto yang hadir dalam Mukhtar Muhammadiyah tersebut telah menegaskan, bahwa Pancasila bukan agama dan agama tidak akan di-Pancasilakan. Dengan demikian, walaupun dengan berat hati, Muhammadiyah tetap menerima asas tunggal Pancasila.⁴⁵

Berkaitan dengan ini, Amin Rais sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah mengibaratkan secara sederhana bahwa asas tunggal Pancasila sama dengan "tiket" bus, sedangkan busnya adalah Indonesia. Jika Muhammadiyah mau naik bus Indonesia, maka Muhammadiyah harus membeli tiket Pancasila.⁴⁶ Tanpa tiket Pancasila, tidak mungkin Muhammadiyah bisa naik bus Indonesia. Ini adalah pilihan terbaik, jika Muhammadiyah ingin menyelamatkan diri sebagai gerakan Islam di Indonesia. Dengan bahasa yang senada, AR. Fakhruddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah mengatakan bahwa asas tunggal Pancasila dibaratkan seperti "helm". Jika mau mengendarai motor, maka pakailah "helm demi keselamatan". AR. Fakhruddin sebagai Ketua PP Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah

⁴⁴ Jan S. Aritonang, *Op. Cit.*, hlm. 437. M.C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 644. M.C. Ricklefs menulis agak sedikit berbeda dengan Jan S. Aritonang. M.C. Ricklefs menulis, bahwa Presiden Suharto resmi mengeluarkan Undang-Undang Keormasan pada bulan Februari 1985. Lihat juga Musyriyah Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 79 dan Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁴⁵ Firdaus Syam, *Op. Cit.*, hlm. 151. Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁴⁶ Asep Gunawan, ed., *Op. Cit.*, hlm. 300.

menjadikan Pancasila sebagai organisasi tidak menjadi masalah. Hanya saja Muhammadiyah tidak bergerak dengan motivasi Pancasila, tetapi karena Islam. Dicantumkannya Pancasila dimaksudkan agar gerak Muhammadiyah tidak keluar dari Pancasila.⁴⁷

Di kalangan pemuda Islam, asas tunggal Pancasila menjadi bahan perdebatan yang sangat tajam. HMI sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berdiri pada tahun 1947 tidak mampu menemukan kata sepakat di antara kader-kadernya. Di kalangan internal HMI, isu asas tunggal Pancasila telah dibahas sejak tahun 1983. Sebagai panduan bagi HMI sebagai intelektual muda Islam, Deliar Noer, seorang intelektual Islam modernis, secara khusus menulis sebuah buku yang membahas tentang "Islam, Pancasila dan Asas Tunggal". Deliar Noer dalam bukunya ini menegaskan, bahwa asas tunggal Pancasila sangat bertentangan dengan realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk.⁴⁸

Hingga tahun 1984, HMI masih satu pendapat dalam menyikapi rencana pemerintah yang ingin menerapkan asas tunggal Pancasila. HMI sepakat untuk menolak keberadaan asas tunggal Pancasila. Di hadapan anggota DPR, PB HMI menyampaikan pokok-pokok pikirannya tentang asas tunggal Pancasila.

"Pancasila sebagai satu-satunya asas hanya dibenarkan dalam konteks kehidupan bernegara. Hal ini sesuai dengan pengertian Pancasila yang sebenarnya sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan fitra kebhinekaan masyarakat Indonesia yang menganut berbagai agama, maka dasar-dasar kehidupan masyarakat yang beragam tersebut tidak dapat dihilangkan dengan cara apapun. Ini berarti masyarakat baik secara individu maupun berkelompok, hak-hak warga negara untuk menetapkan dan melaksanakan kehidupan berdasarkan agamanya

47 Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm. 88. Walaupun Muhammadiyah telah menerima asas tunggal Pancasila, tetapi tidak semua tokoh Muhammadiyah sepakat. K.H. Malik Ahmad adalah salah satu elit Muhammadiyah yang menolak keberadaan asas tunggal Pancasila, karena Pancasila bias mengancam eksistensi Islam. K.H. Malik Ahmad berpendapat, bahwa ia lebih siap menerima pembekuan Muhammadiyah daripada menerima asas tunggal Pancasila. Suara K.H. Malik Ahmad tidak dominan didalam tubuh Muhammadiyah. Suara yang dominan adalah suara yang mau menerima asas tunggal Pancasila, karena tidak ada pilihan lain bagi kelangsungan gerakan Muhammadiyah di Indonesia.

48 Dalam menyikapi isu asas tunggal Pancasila, Deliar Noer, seorang tokoh intelektual muslim modernis, secara khusus membuat sebuah buku yang berjudul, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Di dalam buku ini, Deliar Noer menegaskan, bahwa asas tunggal bertentangan realitas bangsa yang berwajah kemajemukan. Lihat Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983).

masing-masing harus mendapat perlindungan hukum.”⁴⁹

Pada tahun 1985, pergesekan ditubuh HMI mulai memuncak. HMI mendapat tekanan semakin keras dari para alumni yang mendukung “pemikiran baru”, terutama dari kelompok Nurcholis Madjid cs. Kelompok ini meminta kepada HMI untuk tidak berbenturan dengan pemerintah, karena hal itu bertentangan fitrah HMI yang dikenal sebagai organisasi yang demokratis akomodasionis. Selain itu, tekanan keras juga datang dari pemerintah, dimana pemerintahan Suharto tidak akan memberikan izin kongres bila HMI tetap menolak pemberlakuan azas tunggal Pancasila. Besarnya tekanan dari kelompok Nurcholis Majid Cs dan pemerintah, akhirnya berhasil melunakan sebagian tokoh kunci PB HMI. Dengan mempertimbangkan menetralsir citra HMI sebagai organisasi radikal yang anti Pancasila dan menghindari resiko pembubaran, karena tidak izin kongres, maka pada awal April 1985, HMI menyatakan penerimaan azas tunggal Pancasila. Keputusan itu diambil setelah melewati perdebatan panjang di Ciloto, Jawa Barat.⁵⁰

Pada Kongres ke-16 di Padang tahun 1986, HMI menegaskan kembali pernyataannya bahwa HMI secara kelembagaan dapat menerima asas tunggal Pancasila. Hasil kongres ke-16 ini tidak diterima oleh semua cabang HMI. Beberapa cabang HMI melakukan protes dan penolakan atas hasil Kongres HMI ke-16 tersebut. Suara-suara penolakan dari beberapa cabang ini tidak tertampung di PB HMI. Akhirnya, cabang-cabang HMI yang tidak sepakat dengan keputusan Kongres HMI ke-16 membentuk HMI Baru yang bernama HMI MPO (HMI Majelis Penyelamat Organisasi). HMI MPO ini dipimpin oleh Eggie Sudjana. Dengan lahirnya HMI MPO, maka HMI yang menerima asas tunggal Pancasila lebih dikenal dengan nama HMI Dipo (HMI yang berkantor di Jalan Diponegoro). Di mata rezim Orde Baru, maka HMI yang diterima dan direstui adalah HMI Dipo, karena HMI Dipo telah bersedia menjadikan Pancasila sebagai asas organisasinya, sedangkan HMI MPO dianggap sebagai organisasi terlarang, karena HMI MPO tidak mau menerima asas tunggal Pancasila. Sebagai organisasi terlarang, HMI MPO terpaksa bergerak dibawah tanah. HMI MPO memiliki basis yang kuat di daerah Yogyakarta dan Makassar.⁵¹

PII sebagai organisasi pelajar Islam tertua yang lahir pada tahun 1947 merupakan satu-satunya lembaga yang mampu membuat

49 Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 160.

50 Aminudin, *Op. Cit.*, hlm. 161.

51 Syarifuddin Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 89. Sudirman Tebba, *Op. Cit.*, hlm. 12. Jan S. Aritonang, *Op. Cit.*, hlm. 437.

keputusan yang solid di kalangan kader-kadernya. Kader-kader PII sepakat menolak keberadaan asas tunggal Pancasila. Ketua Umum PII, Mutamimul Ula, mengatakan bahwa PII berkewajiban menggunakan Islam sebagai asas tunggalnya, untuk membedakan dengan yang lain. Menurutnya, bahwa keputusan PII untuk tidak menganut Pancasila sebagai asas tunggalnya diambil setelah meneliti Pancasila secara mendalam dan menyeluruh dari aspek hukum, sosiologis dan filsafat berdasarkan pemahaman Islam. Sikap PII yang menolak asas tunggal Pancasila harus dibayar mahal, dimana rezim Orde Baru melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan keputusan tentang pembubaran PII sebagai organisasi. PII dibubarkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 120 dan 12 tanggal 10 Desember 1987. PII dibubarkan, karena PII tidak mengikuti prinsip-prinsip fundamental Undang-Undang Keormasan. Setelah PII dibubarkan oleh rezim Orde Baru, maka PII menjadi organisasi kader yang bergerak dibawah tanah.⁵²

Walaupun sebagian besar kalangan Islam menerima asas tunggal Pancasila, akan tetapi ada beberapa tokoh Islam yang konsisten dengan Islam. Mereka tidak mau menerima asas tunggal Pancasila, karena hal itu bertentangan dengan ajaran Islam. Diantaranya adalah Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, Syafruddin Prawiranegara, Yusuf Abdullah Puar, Deliar Noer dan Abdullah Heamahua dan lain-lain. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir, dua tokoh Islam kelahiran Jawa berdarah Arab yang tidak mau menerima keberadaan asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1972, Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan kawan-kawan mendirikan Pesantren Al Mukmin di desa Ngruki dekat Surakarta. Pada tahun 1985, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri ke Johor Malaysia.⁵³ Deliar Noer juga termasuk tokoh intelektual Muslim Modernis yang tidak bersedia menerima asas tunggal Pancasila. Sebagai resikonya, Deliar Noer pergi merantau dan bekerja sebagai dosen di Australia.

Bagi mereka yang tidak hijrah ke luar negeri, kelompok Islam yang anti dengan azas tunggal Pancasila tetap melakukan gerakan-gerakan perlawanan, bahkan ada sebagian dari gerakan itu telah menyebabkan lahirnya peristiwa-peristiwa berdarah di era Orde Baru, diantaranya adalah peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Peledakam Bom, peristiwa Wolya, peristiwa Usrah di Jawa Tengah, dan peristiwa Lampung Berdarah.

⁵² Syarifuddin Jurdi, *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁵³ M.C. Ricklefs, *Op. Cit.*, hlm. 649.

Penutup

Umat Islam memiliki andil yang besar dalam melahirkan Orde Baru. Atas dasar itu umat Islam banyak berharap untuk dapat terlibat dalam pengelolaan negara di Era Orde Baru. Hal itu dimulai dengan adanya usaha untuk menghidupkan kembali Partai Masyumi sebagai wadah politik umat Islam Indonesia. Soeharto sebagai penguasa Orde Baru tidak memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk berbenah diri, karena Soeharto takut bahwa hal itu bisa membuat ancaman bagi Soeharto dalam memelihara kekuasaan.

Soeharto tidak hanya melarang rehabilitasi Masyumi, tetapi Soeharto sebagai penguasa Orde Baru secara sistematis melakukan politik de-Islamisasi. Puncak politik de-Islamisasi Soeharto adalah diberlakukannya azas tunggal Pancasila pada tahun 1985. Azas tunggal Pancasila telah melahirkan kontroversial di kalangan umat Islam. Sebagian besar umat Islam Indonesia bisa menerima azas tunggal, walaupun dalam keadaan terpaksa. Bagi umat Islam yang tidak mau menerima azas tunggal Pancasila, maka mereka dianggap sebagai gerakan bawah tanah yang anti pada pemerintah. Sebagai kata penutup dari kesimpulan ini, penulis ingin mengemukakan bahwa posisi umat Islam di era Orde Baru bisa diibaratkan dengan “mendorong mobil mogok”, setelah mobilnya hidup, maka mobilnya segera melaju dan umat Islam tertinggal di belakang dan hanya dapat menikmati asapnya saja.

Daftar Pustaka

- Abdul Qadir Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*, (Surabaya: Tri Bakti, 1996)
- Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Rezim Soeharto*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Ahmad Ibrahim dkk, ed., *Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1990)
- Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKIS, 1999)
- A.Pambudi, *Supersemar Palsu Kesaksian Tiga Jendral*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006)
- Asep Gunawan, Ed., *Artikulasi Islam Kultural Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah*, (Jakarta: Srigunting, 2004)

- Asvi Warman Adam, *Suharto Sisi Gelap Sejarah Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak, 2004)
- Deliar Noer, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983)
- Dhurorudin Mashad, *Akar Konflik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2008)
- Eros Djarot dkk, *Misteri Supersemar*, (Jakarta: Mediakita, 2006)
- Firdaus A.N., *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999)
- Firdaus Syam, *Amien Rais Politisi Yang Merakyat dan Intelektual Yang Shaleh*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2003)
- Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006)
- Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto., *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKIS, 1994
- M. Abdul Karim dkk, *Wacana Politik Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Suka Press, 2007
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Jakarta: Serambi, 2008
- Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2005
- Mundzirin Yusuf dkk., *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pinus, 2006
- Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993
- Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007

